

PARTAI POLITIK DAN PEMBANGUNAN POLITIK

Ellya Rosana*

Abstrak

Partai politik merupakan pencerminan dari negara yang demokratis yang diyakini sebagai prasarat bagi kehidupan negara moderen. Tanpa menunjuk kepentingan yang mana dan oleh siapa, jelas bahwa partai politik merupakan lembaga penyalur kepentingan, yang menyalurkan kepentingan rakyat dan kepentingan penguasa. Sebagai lembaga penyalur kepentingan, partai politik dijadikan komunikasi yang berfungsi dua arah, yaitu dari atas ke bawah dan juga dari bawah ke atas. Jika hal itu dapat terlaksana dengan baik, maka fungsi partai politik sebagai sosialisasi politik, partisipasi politik, komunikasi politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, serta pembuatan kebijakan dapat berjalan dengan baik sehingga pembangunan politik yang diharapkan dapat terwujud.

Kata Kunci : Partai Politik, Pembangunan Politik

Pendahuluan

Secara awam yang namanya “Partai Politik” dimana pun merangsang asosiasi orang yang mendengar istilah tersebut dengan citra yang buruk. Orang partai dianggap sebagai penipu, orang yang suka ngomong melulu, orang yang selalu gila kekuasaan, orang yang selalu menjual kepentingan umum bagi kepentingan mereka sendiri.¹

Walaupun tidak seluruh persepsi itu benar, namun beberapa alasan yang mendorong timbulnya asosiasi pesimistik tersebut didasarkan hal-hal empirik yang benar dan wajar. Siapapun akan

* Dosen Pemikiran Politik Islam pada Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung.

¹ Tulus Warsito, *Pembangunan Poltik Refleksi Kritis atas Krisis* (Yogyakarta : BIGRAF Publishing, 1999), h. 94

mudah menyetujuinya bahwa : hanya ketika kampanye pemilu saja (terutama di Indonesia) orang-orang partai dengan segala janji-janjinya mendekati "umat"nya agar mau mendukung partai mereka. Dalam konteks seperti itu, ada yang mengibaratkan hubungan antara partai politik dan umat bagaikan gerhana. Dalam fenomena gerhana kelihatannya ada dua planet saling bertemu, tetapi kenyataannya tidak, dan itu pun terjadi hanya sesekali dalam bentangan waktu yang lama.²

Disinilah tugas partai politik agar dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, dimana partai politik tidak hanya memperhatikan masyarakat di saat kampanye saja atau menjelang pesta demokrasi, setelah itu dilupakan dan dibubarkan tanpa ada proses evaluasi. Kenyataannya partai politik justru memberikan contoh yang buruk, hal ini tercermin pada kampanye pemilu. Harusnya partai politik menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan elite dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa.

Jika kita melihat ke belakang dari sejarah munculnya partai politik, dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dan diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah di pihak lain. Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah moderen atau sedang dalam proses

² *Ibid*

memodernisasikan diri. Maka dari itu, dewasa ini di negara-negara baru pun partai sudah menjadi lembaga politik yang biasa dijumpai.³

Faktanya, kondisi rakyat sekarang ini masih serba keterbelakangan dan ketidaktahuan politik, oleh sebab itu untuk merangsang partisipasi politik secara aktif dari rakyat dalam usaha pembangunan, perlu adanya pendidikan politik, antara lain :⁴

- a. Membuat rakyat menjadi melek politik / sadar politik
- b. Lebih kreatif dalam partisipasi sosial di era pembangunan
- c. Sekaligus menghumanisasikan masyarakat, agar menjadi "leefbaar" yaitu lebih nyaman dan sejahtera untuk dihuni oleh semua warga masyarakat Indonesia

Partai Politik

Partai politik adalah salah satu komponen yang penting dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Partai politik dipandang sebagai salah satu cara seseorang atau sekelompok individu untuk meraih kekuasaan. Argumen seperti ini sudah biasa kita dengar di berbagai media massa dan dalam seminar-seminar yang kita ikuti khususnya yang membahas tentang partai politik.

Secara etimologi politik berasal dari kata *polis* (Yunani) yang berarti kota atau negara kota. Kemudian diturunkan kata-kata *politie* yang berarti warga negara, *politike te ckne'* berarti kemahiran politik dan politik episteme yang berarti ilmu politik. Secara istilah politik

³ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia, 1989) h. 159

⁴ Karini Kartono, *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), h. xvii

adalah usaha untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita atau ideologi.⁵

Orang pertama yang memperkenalkan kata *politik* adalah Aristoteles⁶ melalui pengamatannya tentang “ manusia yang pada dasarnya adalah binatang politik”.⁷ Ia menjelaskan hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik dan interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Dalam arti luas setiap orang adalah politisi. Dalam hal ini Aristoteles berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk memaksimalkan kemampuan seorang individu dan untuk mencapai bentuk kehidupan sosial yang tertinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain dalam suatu kerangka kelembagaan, yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan untuk membentuk tujuan kolektif-negara. Karena itu semua orang adalah politisi, meski sebagian (penjabat negara) lebih banyak melakukan kegiatan politik bila dibandingkan dengan yang lainnya.⁸

Secara umum dapat dikatakan Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotnya mempunyai

⁵ Soelistyati Ismail Gami, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984) h. 14

⁶ Aristoteles (384-322 S.M.) dipandang sebagai bapak *Ilmu Politik* dan Plato (424-347 S.M.) sebagai bapak *Filsafat Politik*, sekurang-kurangnya di Barat, keduanya memandang negara dari perspektif filosof yang melihat semua pengetahuan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Lihat: Carlton Clymer Rodee dkk., *Introduction to Political Science*, terj. Zulkifly Hamid, *Pengantar Ilmu Politik*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 6

⁷ *Ibid.*, h 2

⁸ *Ibid.*, h. 3

orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.⁹ Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Menurut Carl J. Friedrich yang dikutip Miriam Budiardjo, Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.¹⁰

Sigmund Neumann menyebutkan bahwa Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.¹¹

Batasan partai politik menurut RH Soltau dalam *An Introduction to Politics* ternyata sama dengan batasan yang diberikan oleh Raymond Garfield Gettel dalam *Political Science*. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah organisasi dengan mana orang ataupun golongan berusaha untuk memperoleh serta menggunakan kekuasaan.¹²

Mengacu dari beberapa definisi mengenai partai politik, dapat diambil kesimpulan bahwa partai politik merupakan hasil

⁹ Miriam Budiardjo, *Op.Cit.* h. 160-161.

¹⁰ *Ibid.*, h. 161

¹¹ *Ibid.*, h. 162

¹² Soelistyati Ismail Gani., *Op.Cit.* h. 112

pengorganisasian dari sekelompok orang agar memperoleh kekuasaan untuk menjalankan program yang telah direncanakan.

Pembangunan Politik

Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat, dan sebagainya. Dengan pemahaman seperti itu, “pembangunan” disejajarkan dengan kata “perubahan social”. Bagi penganut pandangan ini konsep pembangunan adalah berdiri sendiri sehingga membutuhkan keterangan lain, seperti pembangunan model kapitalisme, pembangunan model sosialisme, ataupun pembangunan model Indonesia. Dalam pengertian seperti ini, teori pembangunan berarti teori sosial ekonomi yang sangat umum. Pandangan ini menjadi pandangan yang menguasai hampir setiap diskursus mengenai sosial.¹³

Sementara itu, di lain pihak terdapat suatu pandangan lebih minoritas yang berangkat dari asumsi bahwa kata ”pembangunan” itu sendiri adalah sebuah *discourse*, suatu ideologi dan teori tentang perubahan sosial. Dalam pandangan ini konsep pembangunan sendiri bukanlah kata yang bersifat netral, melainkan suatu aliran dan keyakinan ideologis dan teoritis serta praktik mengenai perubahan sosial.¹⁴

¹³ Mansour Fakih. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. (yogyakarta : Insis Press, 2009), h. 8-9

¹⁴ *Ibid*

Jika dilihat secara lebih mendalam dari pengertian dasarnya, pembangunan merupakan suatu istilah yang dipakai dalam bermacam-macam konteks, dan seringkali digunakan dalam konteks politik dan ideologi tertentu. Ada banyak kata yang mempunyai persamaan makna dengan kata pembangunan, misalnya perubahan sosial, pertumbuhan, progres, dan modernisasi. Dari kata-kata tersebut hanya perubahan sosial yang memberi makna perubahan ke arah yang lebih positif. Oleh karena itu makna pembangunan bergantung dari konteks siapa yang menggunakannya dan untuk kepentingan apa.

Dalam konteks pembangunan politik, pendidikan nasional selalu diindikasikan memiliki dua sisi yang dilematik. Pada satu sisi, keharusan untuk melaksanakan pendidikan nasional secara merata dan berkesinambungan memang perlu dilakukan, setidaknya agar setiap lapisan masyarakat (terutama di negara berkembang seperti Indonesia) menjadi lebih sadar politik, sadar hukum, serta sadar lingkungan dalam arti seluas-luasnya. Pendidikan nasional mempunyai peran amat vital dalam mempersatukan bangsa (*nation building*).¹⁵

Disisi lain, ketika pendidikan nasional telah menghasilkan sejumlah masyarakat terdidik, ketika itu pula konsep manusia seutuhnya menjadi mengemuka untuk dicarikan manifestasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan nasional yang semula ditujukan bagi *nation building* ternyata tidaklah cukup dibangun di atas pertimbangan-pertimbangan formalitas pendidikan akademik saja melainkan harus juga berdasarkan pada tuntutan aspirasi politik yang diakibatkan oleh pendidikan akademik tersebut.¹⁶

¹⁵ Tulus Warsito, *Op.Cit.*, h. 3

¹⁶ *Ibid.*, h. 4

Tujuan pendidikan dan pengajaran di Indonesia ialah untuk membentuk manusia suslila yang cakap, dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air berdasarkan asas Pancasila dan UUD 1945.¹⁷ Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional kita tersebut di atas, maka tujuan pendidikan politik di Indonesia adalah :¹⁸

1. Menampilkan peranan insan/humani setiap individu yang unik selaku warga negara, dengan jalan mengembangkan potensi dan bakat kemampuan semaksimal mungkin
2. Agar mampu aktif berpartisipasi dalam proses politik untuk membangun bangsa dan negara

Masih dalam konteks pembangunan politik, bahwa pendidikan nasional apalagi dalam sub sektor pendidikan tinggi, mau tidak mau harus dijadikan sarana strategis bagi kaderisasi pemimpin bangsa, karena dari tempat itulah sosok pemikir kemajuan bangsa dan negara dapat diharapkan muncul, terutama pada era komunikasi global yang menuntut daya saing yang amat ketat dan multidisipliner. Sekarang bukanlah era yang pantas mengharapkan pemimpin bangsa turun dari pertapaan dan menamakan dirinya sebagai ratu adil, melainkan saatnya memacu keterbukaan akal dan ketakwaan yang kompetitif untuk memajukan bangsa dan negara di tengah peradaban global yang tak lagi dapat dimanipulasi hanya oleh kekuasaan formal yang sifatnya sesaat.

¹⁷ Firmanzah, *Pengelola Partai Politik* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 75

¹⁸ *Ibid.*, h. 82

Pembangunan politik bukanlah sekedar perubahan politik, melainkan pengembangan kesadaran politik masyarakat secara berkesinambungan dan berkeadilan. Artinya jika pendidikan nasional harus juga mengemban misi pembangunan politik, maka ia harus juga memajukan semua orang, meningkatkan kesadaran hak dan tanggung jawab politik mereka, meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, dan tentu saja juga harus melengkapi prediksi mereka sebagai manusia seutuhnya. Pendidikan nasional dilaksanakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan untuk memajukan kemanusiaan, bukan sekedar kecerdasan untuk menyiasati pembangunan, juga bukan kecerdasan untuk membodohi sesama.¹⁹

Partai Politik dan Pembangunan Politik

Banyak orang menganggap bahwa setiap negara harus mempunyai partai politik. Banyak orang menganggap pula bahwa negara yang mempunyai partai politik adalah negara maju. Bahkan di beberapa literatur dijelaskan bahwa partai politik adalah bagian dari pembangunan politik yang demokratis.

Pada kenyataannya banyak negara yang tidak mempunyai partai politik, yang mau tak mau harus membangun politik yang demokratis. Sebaliknya, di negara-negara yang sudah berpartai politik, walaupun seolah-olah telah mengaplikasikan teori pembangunan politik yang demokratis, ternyata justru menghadapi kenyataan yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.²⁰

Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun

¹⁹ Tulus Warsito, *Op.Cit.* h.6

²⁰ *Ibid.*, h. 106

berdasarkan idiologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik yang demokrasi untuk mendapatkan dan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum.

Kalaupun sekarang partai politik ternyata harus hadir dalam kehidupan masyarakat republik, ketika kelompok bangsawan dianggap tidak ada lagi, bukan berarti bahwa manfaat partai politik menjadi tidak penting. Partai politik yang kita kenal sekarang adalah lembaga pengendalian konflik kepentingan yang ada dalam masyarakat politik nasional. Partai politik adalah lembaga yang harus mengagregasi, mengartikulasi kepentingan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk mensosialisasikan nilai-nilai politik yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.²¹ Hal tersebut sejalan dengan fungsi dari partai politik yaitu :²²

1. Sosialisasi politik; adalah fungsi sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada.
2. Partisipasi politik; adalah fungsi yang dimiliki partai politik untuk mendorong masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan politik
3. Komunikasi politik; adalah fungsi menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang

²¹ *Ibid.*, h. 107

²² A. Rahman HI, *Op.Cit.*, h. 103-104

4. Artikulasi Kepentingan; adalah fungsi menyatakan atau menyampaikan (mengartikulasi)kepentingan konstituen (masyarakat) kepada badan-badan politik dan pemerintah melalui melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang lain yang memiliki kepentingan yang sama
5. Agregasi kepentingan; adalah fungsi partai politik yang memadukan semua aspirasi yang ada dalam masyarakat yang kemudian dirumuskan sebagai program politik dan diusulkan kepada badan legislatif dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan mengadakan tawar-menawar dengan kelompok-kelompok kepentingan, dengan menawarkan pemenuhan kepentingan mereka kalau kelompok kepentingan itu mau mendukung calon tersebut.
6. Pembuatan kebijakan; adalah fungsi yang dimiliki oleh partai politik setelah partai politik meraih dan mempertahankan kembali kekuasaan didalam pemerintahan secara konstitusional.

Sedangkan fungsi partai politik menurut UU No. 31, tentang partai politik adalah sebagai sarana : ²³

1. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi WNI RI yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Menciptakan iklim yang kondusif sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat
3. Penyerap, penghimpun, danpenyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan

²³ *Ibid.*, h. 112

kebijakan negara. Partisipasi politik WNI dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Apabila partai politik selalu tampil dalam keadaan konfliktual, hal ini terjadi karena memang fungsi mereka adalah untuk mengendalikan konflik, walaupun seingkali pula justru mereka menciptakan konflik-konflik baru. Partai politik adalah "mesin politik" yang memang diperlukan untuk menjalankan mekanisme sistem politik yang ada. Partai politik adalah bagian terpenting dari *political engineering*.²⁴

Dalam menjalankan fungsinya, partai politik akan ikut ditentukan oleh kelompok-kelompok dan tujuan yang ingin dicapai. Suatu partai revolusioner akan berjuang untuk merubah seluruh tatanan organisasi pemerintahan, kebudayaan masyarakat, dan sistem ekonomi dari suatu kondisi; dan apabila berhasil ia akan mengendalikan setiap kegiatan penting dalam masyarakat itu. Suatu partai konservatif dan tradisional, yang terjadi adalah sebaliknya yaitu hanya berusaha mempertahankan keadaan seperti apa adanya.

Hal ini sejalan dengan tujuan yang diharapkan dalam mendirikan dan mengembangkan partai politik yaitu :²⁵

1. Untuk menjadi wadah aktualisasi diri bagi warga negara yang memiliki kesadaran yang tinggi untuk ikut serta dalam partisipasi politik

²⁴ Tulus Warsito, *Op.Cit.* h 108.

²⁵ A. Rahman HI, *Op.Cit.* h. 103

2. Untuk menjadi wadah agegasi kepentingan
3. Untuk menjadi sarana dalam upaya untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan politik
4. Untuk menjadi wadah berhimpun bagi masyarakat atau kelompok yang memiliki idiologi dan kepentingan yang sama.

Partai politik sebagai salah satu sarana pendidikan politik yang dapat mengadakan perubahan atau pembangunan politik. Objek perubahan atau unsur politik yang biasanya diobservasi oleh ilmuwan politik ialah sistem nilai politik, struktur kekuasaan, strategi penanganan permasalahan kebijakan umum dan lingkungan masyarakat (kondisi-kondisi sosial-budaya, ekonomi, dan teknologi) dan fisik (sumber alam) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem politik

Struktur kekuasaan adalah pengaruh infrastruktur dan suprastruktur dalam proses kebijakan. Infrastruktur yang dimaksud adalah mesin politik yang ada dalam masyarakat yang tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik negara,²⁶ sedangkan suprastruktur politik adalah mesin politik yang ada dalam negara yang memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik negara.²⁷

²⁶ Faktor yang bersifat informal (tidak atau kurang resmi) yang dalam kenyataan mempengaruhi cara kerja aparat masyarakat untuk mengemukakan, menyalurkan, menerjemahkan, mengkonversikan tuntutan, dukungan yang berhubungan dengan kepentingan umum. Kelompok ini termasuk golongan peneken, alat komunikasi massa, dan lain-lain.

²⁷ Lembaga yang dapat disebut sebagai mesin politik formal atau resmi, yang dengan abash mengidentifikasi berbagai masalah, menentukandan menjalankan segala keputusan yang mengikat seluruh anggota masyarakat untuk mencapai kepentingan umum.

Struktur kekuasaan infrastruktur meliputi pengaruh berbagai kelompok sosial, keagamaan, dan ekonomi dalam proses kebijakan, dan pengaruh partai politik dalam memadukan berbagai kepentingan yang bertentangan ke dalam beberapa alternatif kebijakan umum. Struktur kekuasaan suprastruktur meliputi berbagai karakteristik distribusi dan pelaksanaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga pemerintah, seperti dimensi kekuasaan (tingkat penggunaan kekuasaan paksaan dan konsensus), distribusi kekuasaan (tingkat sentralisasi kekuasaan), dan intensitas kekuasaan (lingkup kekuasaan pemerintah dan tingkat otonomi infrastruktur dari kontrol pemerintah).

Pada umumnya para ilmuwan menyebutkan dua faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan politik, yaitu konflik kepentingan dan gagasan atau nilai-nilai baru.²⁸ Sejumlah ilmuwan menunjukkan konflik kepentingan diantara berbagai kelompok (kelas ataupun asosiasi) sebagai penyebab utama perubahan politik. Menurut pandangan ini perubahan merupakan hasil interaksi kepentingan yang secara ketat dikontrol, bahkan ditentukan oleh posisi sosial atau kondisi materiil elite yang terlibat. Bagi pandangan yang bersifat materialistis ini, gagasan atau nilai-nilai merupakan pencerminan dari kepentingan saja.²⁹

Selain konflik kepentingan, perubahan dapat pula terjadi karena munculnya gagasan atau nilai-nilai baru. Pandangan ini

²⁸ Raymond Boundon, *Theories Of Social Change : A Critical Appraisal*. Diterjemahkan oleh J.C. Whitehouse, cal University of California Press, 1986. h. 121-153.

²⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992) h. 246

melihat gagasan dan nilai-nilai sebagai variabel yang independen yang menjelaskan perbedaan antara sistem sosial dan proses –proses perubahan dan reproduksi. Nilai-nilai tidak hanya menghasilkan dinamisme dan kemajuan, tetapi juga stagnasi dalam masyarakat. Masyarakat akan berkembang dan dinamis apabila kebutuhan prestasi dan sukses dinilai sangat tinggi oleh individu anggota masyarakat.

Faktor lain yang juga penting dalam menimbulkan perubahan, yakni adanya berbagai kebijakan yang secara disengaja, terencana, dan terorganisir dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.³⁰

Penutup

Partai politik diharapkan dapat memberikan perubahan yang berarti bagi negara yaitu perubahan yang bersifat positif. Dengan adanya partai politik, maka negara yang demokratis yang selama ini diharapkan dapat terwujud. Walaupun sampai sekarang tidak satu keharusan di muka bumi ini yang mewajibkan setiap negara harus mempunyai partai politik, tetapi untuk menghilangkan partai politik dari kehidupan bernegara kita rasanya seperti mundur beberapa abad.

Dengan kata lain, seburuk apa pun citra partai politik kita, ia harus hadir sebagai atribut modernitas cara kita berbangsa dan bernegara, walaupun ada beberapa negara kaya tanpa partai politik, tetapi kita tidak rela menjadikan republik ini berlangsung tanpa partai politik, karena partai politik merupakan salah satu pencerminan dari negara demokrasi.

³⁰ *ibid.*, h. 247.

Daftar Pustaka

- Rahman HI, *Sistem Politik Indonesia*. Jogjakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Firmanzah, *Pengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2009.
- Kartini Kartono, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*, Bandung: Mondar Maju, 2009.
- Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Insis Press, Yogyakarta, 2009.
- Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1989.
- Raymond Boundon, *Theories Of Social Change : A Critical Appraisal*, California: Cal University of California Press, 1986.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Soelistiyati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Tulus Warsito, *Pembangunan Politik Refleksi Kritis atas Krisis* Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 1999.